

Dinamika Politik Pancasila: Antara Idealisme dan Realitas dalam Konteks Indonesia (Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto)

Nikodemus Pangareho¹

¹STFT Widya Sasana Malang

Pos-el/Phone number: nikodemuspangareho@gmail.com

Diajukan: Maret, 2024; **Direview:** April, 2024.; **Diterima:** Juni, 2024; **Dipublish:** Juni, 2024

Abstrak: The focus of this study is to investigate the political dynamics of Pancasila in Indonesia, exploring the contrast between idealism and reality that arises in the application of Pancasila principles in political practice. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, represents five main principles: Belief in One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Guided by Wisdom in Deliberation and Representation, and Social Justice for All Indonesian People. However, in reality, the implementation of Pancasila in politics is often affected by power dynamics, political interests, and interactions between the interests of different individuals. The author uses descriptive analysis methods and Armada Riyanto's thoughts on political philosophy. The idealism of Pancasila often conflicts with complex and often corrupt political realities. In this context, the article's argument highlights the challenges faced in realizing the ideal vision of Pancasila amidst complex political dynamics and continuous social change in Indonesia. By analyzing the relationship between idealism and political reality, this paper seeks to provide a better understanding of political dynamics in Indonesia and the importance of navigating the conflict between ideal concepts and political reality in achieving sustainable and inclusive development goals.

Keywords: Pancasila, Political Dynamics, Idealism vs Reality, Implementation of Pancasila and Indonesian Political Challenges.

Abstrak: Fokus studi ini ialah menyelidiki dinamika politik Pancasila di Indonesia, mengeksplorasi kontras antara idealisme dan realitas yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik politik. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mewakili lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, implementasi Pancasila dalam politik sering kali terpengaruh oleh dinamika kekuasaan, kepentingan politik, dan interaksi antara berbagai kepentingan individu yang berbeda. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan pemikiran Armada Riyanto tentang filsafat politik. Idealisme Pancasila sering bertentangan dengan realitas politik yang kompleks dan sering kali korup. Dalam konteks ini, argumen tulisan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi ideal Pancasila di tengah dinamika politik yang kompleks dan perubahan sosial yang terus-menerus di Indonesia. Dengan menganalisis hubungan antara idealisme dan realitas politik, tulisan ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik di Indonesia dan pentingnya menavigasi konflik antara konsep ideal dan kenyataan politik dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Pancasila, Dinamika Politik, Idealisme vs Realitas, Implementasi Pancasila dan Tantangan Politik Indonesia.

Pendahuluan

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, telah menjadi fokus perdebatan yang berkelanjutan dalam konteks politik Indonesia. Tulisan ini mengarah pada penyelidikan mendalam terhadap dinamika politik Pancasila di Indonesia dengan mengeksplorasi kontras yang ada antara idealisme dan realitas dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik politik. Konsep dasar Pancasila terdiri dari lima prinsip utama yang mengarah pada visi negara yang adil dan beradab: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dinamika politik Pancasila di Indonesia adalah masalah yang kompleks, di mana idealisme dan realitas sering berbenturan. Pancasila, sebagai dasar negara, menawarkan visi yang mulia tentang keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Namun, dalam realitas politiknya, implementasi Pancasila sering kali terdistorsi oleh dinamika kekuasaan, korupsi, dan pertarungan kepentingan politik yang menguntungkan oknum tertentu. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara cita-cita Pancasila dan praktik politik sehari-hari di Indonesia. Setelah dikungkung oleh kekuasaan represif, burung Garuda Pancasila sekarang menyusuri panorama tantangan global yang tidak kurang dahsyat. Dunia tidak lagi disibukkan oleh perkara ideologi (ideologi telah mati) melainkan berbagai krisis konkret pangan, krisis energi, resesi ekonomi dan pemanasan global (Eko Armada Riyanto 2014).

Akibat dari krisis ideologi adalah dalam mewujudkan visi ideal Pancasila dan kompleksitas dinamika politik yang terus berubah di Indonesia. Perubahan sosial, kepentingan politik yang beragam, dan tekanan eksternal serta internal memperumit upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten dalam praktik politik di Indonesia (Aulia, Dewi, and Furnamasari 2021). Korupsi juga menjadi faktor yang menghambat implementasi Pancasila di Indonesia. Korupsi merajalela di berbagai level pemerintahan dan mempengaruhi keputusan politik serta penggunaan sumber daya negara. Hal ini menyebabkan deviasi dari prinsip-prinsip Pancasila yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika dalam kepemimpinan dan pemerintahan, malah menjadi tontonan. Politik yang ada di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan etika dan moral karena ada pedoman yang jelas yaitu Pancasila. Pancasila inilah yang seharusnya menjadi jembatan masyarakat Indonesia untuk menuju negara yang baik, benar dan bebas dari korupsi. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah pemimpin negara seringkali meludahi moral dan etika itu sendiri.

Pelanggaran moral dan etika tampak pada pertarungan antar kepentingan politik yang beragam, menjadi penghambat utama dalam mewujudkan visi Pancasila yang ideal. Berbagai kelompok politik dan kepentingan ekonomi, sosial, dan agama seringkali bersaing untuk mendominasi panggung politik, mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila demi mencapai tujuan-tujuan oknum tertentu (Lubis 2018). Krisis kepemimpinan dan kurangnya integritas dalam dunia politik juga merupakan faktor yang menyulitkan dalam menjembatani kesenjangan antara idealisme dan realitas politik Pancasila. Kurangnya pemimpin yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan keraguan dalam masyarakat terhadap efektivitas Pancasila sebagai landasan negara. Dengan demikian, untuk mengatasi kesenjangan antara idealisme dan realitas politik Pancasila di Indonesia, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemimpin politik. Perlunya reformasi politik, penguatan lembaga-lembaga negara, penegakan hukum yang kuat, dan pendidikan politik yang lebih baik menjadi kunci dalam memperbaiki dinamika politik dan mewujudkan visi Pancasila yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kontras antara visi ideal Pancasila yang mengutamakan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dengan realitas politik di Indonesia yang seringkali terpengaruh oleh dinamika kekuasaan, korupsi, dan pertarungan antar kepentingan politik? Bagaimana

kompleksitas dinamika politik yang terus berubah di Indonesia mempengaruhi upaya implementasi prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari? Apa komitmen pemimpin untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten menyebabkan ketidakstabilan politik dan keraguan dalam masyarakat terhadap efektivitas Pancasila sebagai landasan negara, serta bagaimana hal ini dapat diatasi melalui upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemimpin politik?

Metode Penulisan

Metode penulisan dalam studi ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang didasarkan pada pemikiran Armada Riyanto tentang filsafat politik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan dan menganalisis dinamika politik Pancasila di Indonesia dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Langkah pertama dalam metode penulisan adalah mengidentifikasi kontras antara idealisme dan realitas yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik politik. Ini melibatkan pembahasan tentang visi ideal Pancasila yang diwakili oleh lima prinsip utama serta bagaimana kontras tersebut tercermin dalam realitas politik yang kompleks dan korup di Indonesia. Selanjutnya, penulis melakukan analisis deskriptif terhadap dinamika politik Pancasila dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dinamika kekuasaan, kepentingan politik, dan interaksi antara berbagai kepentingan politik yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan secara detail bagaimana implementasi Pancasila dalam politik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Metode penulisan ini juga melibatkan analisis pemikiran Armada Riyanto tentang filsafat politik sebagai kerangka konseptual untuk memahami konflik antara idealisme dan realitas politik Pancasila. Pemikiran Riyanto memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara konsep ideal Pancasila dan realitas politik yang kompleks di Indonesia. Dalam konteks ini, penulis menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi ideal Pancasila di tengah dinamika politik yang kompleks dan perubahan sosial yang terus-menerus di Indonesia. Analisis hubungan antara idealisme dan realitas politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik di Indonesia serta pentingnya menavigasi konflik antara konsep ideal dan kenyataan politik dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Secara keseluruhan, pendekatan analisis deskriptif dan penggunaan kerangka konseptual dari pemikiran Armada Riyanto merupakan landasan metodologis yang kuat dalam menyelidiki dinamika politik Pancasila di Indonesia. Metode ini menuntun penulis untuk menguraikan dan menganalisis secara komprehensif kontras antara idealisme dan realitas politik Pancasila serta implikasinya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isi dan Pembahasan

Sejarah Pancasila dan konteks Politik Indonesia

Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara, melainkan juga sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaan pemerintah (Abidin 2020). Sejarah Pancasila membawa manusia kembali ke periode awal kemerdekaan Indonesia, ketika negara baru, sedang menghadapi tantangan besar dalam menentukan landasan filosofis dan ideologisnya. Latar belakang sejarah pembentukan Pancasila terkait erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Pada masa itu, terdapat berbagai pandangan dan ideologi yang berbeda di kalangan pemimpin nasionalis Indonesia, yang mewakili beragam latar belakang politik, sosial, dan agama. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, Pancasila sebenarnya bukan hanya menjadi ideologi, dasar negara, dan pedoman tunggal yang dimiliki oleh negara semata. Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai yang aktif mengalir dalam kehidupan masyarakat, atau yang disebut sebagai nilai-nilai hidup atau *the living values* (Abidin 2020).

Pengaruh politik dan sosial yang dominan pada masa itu memainkan peran penting dalam pembentukan Pancasila. Ideologi-ideologi seperti nasionalisme, agama, dan sosialisme memiliki pengaruh kuat dalam menentukan visi negara yang diinginkan oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Namun, di tengah persaingan dan konflik ideologis tersebut, perlu adanya kesepakatan yang bersifat inklusif untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menggunakan konsep *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung* untuk menjelaskan Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental dalam struktur negara serta sebagai pandangan hidup bangsa dalam membentuk kehidupan kebangsaan yang etis dan bermoral (Tome 2020).

Implementasi awal Pancasila dalam politik Indonesia terjadi segera setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Yani 2018). Namun, implementasi awalnya tidak selalu berjalan lancar, terutama karena tantangan politik dan sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia. Pada era Orde Lama, di mana Soekarno menjadi ikon pada saat itu, kekuasaannya sebagai presiden seumur hidup mengesampingkan prinsip UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dengan kemungkinan pemilihan kembali. Hal ini menunjukkan penafsiran yang berbeda terhadap nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam Pasal 7 UUD 1945. Selama periode ini, komunisme berkembang dengan kuat di sebagian masyarakat Indonesia, bahkan secara terstruktur melalui kekuatan partai politik seperti Partai Komunis Indonesia (Tome 2020). Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Pancasila menjadi sesuatu yang dianggap suci dan tidak boleh dipertanyakan. Di era ini, Pancasila dianggap lebih tinggi nilainya daripada agama. Kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan Soeharto seringkali dicap sebagai anti-Pancasila. Pancasila digunakan oleh rezim Soeharto sebagai alat untuk menindas lawan politik, termasuk para kritikus kebijakan pemerintah. Meskipun awalnya Soeharto berusaha untuk membersihkan pelaksanaan Pancasila dari penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama, seiring berjalannya waktu, Soeharto menjadi penguasa yang mengendalikan semua aspek kekuasaan di dalam bangsa dan negara (Tome 2020). Reformasi lahir sebagai respons terhadap dominasi kekuasaan yang ditegakkan oleh Soeharto, yang membatasi kebebasan warga negara dalam menyalurkan hak-hak konstitusional mereka. Ironisnya, semangat kebebasan yang menjadi inti dari gerakan reformasi terkadang berujung pada tontonan. Upaya untuk mengekspresikan hak-hak individu kadang-kadang mengorbankan hak-hak orang lain (Tome 2020).

Selama 78 tahun Indonesia merdeka, nilai dasar Pancasila tampaknya semakin menjauh dari kehidupan masyarakat. Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari, sehingga menjadi semacam dogma yang kehilangan maknanya. Contoh yang jelas adalah meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya mencakup pencurian uang negara, tetapi juga mencerminkan kehilangan nilai kemanusiaan dari para pelaku korupsi, yang hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu tanpa memperhatikan dampaknya bagi orang lain dan penggunaan uang yang seharusnya untuk kepentingan bangsa (Lubis 2018). Selain itu, ada juga contoh kekerasan yang mengancam prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan melihat dinamika sejarah Pancasila yang belum mencapai harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi penting bagi warga negara untuk merenungkan kembali cara terbaik untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Penegakkan Pancasila diakui secara formal sebagai dasar negara, tantangan implementasi tidak bisa dihindari. Berbagai konflik politik dan sosial, baik dari dalam maupun luar negeri, seringkali menghalangi upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila secara efektif dalam kebijakan publik dan praktik politik sehari-hari. Terlebih lagi, pertarungan kepentingan politik yang beragam dan dinamika kekuasaan yang kompleks turut mempersulit proses implementasi nilai-nilai Pancasila. Sejarah Pancasila dan konteks politik Indonesia menunjukkan perjalanan yang panjang dan berliku dalam menjadikan Pancasila sebagai fondasi negara yang kuat dan kokoh (Aulia et al. 2021).

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, Pancasila tetap menjadi prinsip yang mendasari pembangunan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia hingga saat ini.

Eko Armada Riyanto: Konsep Ideal Pancasila dan Realitas Politik

Pidato yang terukir di dalam sejarah dipatenkan sebagai “Pidato Kelahiran Pancasila”, tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Soekarno menyebut bahwa Pancasila *Philosophische Grpndslag*. “*Philosophische Grpndslag* adalah fundamen atau fondasi, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi” (Armada Riyanto 2015). Konteks pidato tersebut, Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis yang mendalam bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ide atau konsep, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat, filsafat pikiran yang mendalam, jiwa, dan hasrat yang paling mendalam bagi bangsa Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila menjadi landasan yang kokoh untuk membangun bangsa Indonesia yang merdeka, yang akan berdiri tegak dan abadi. Dengan demikian, dalam pidato tersebut, Soekarno menegaskan pentingnya Pancasila sebagai panduan moral dan filosofis bagi negara Indonesia yang baru merdeka dan berdiri.

Dari untaian kalimat Pidato Soekarno yang historis ini, kata yang hendak kami garis bawahi dan kami kembangkan dalam buku ini ialah “*sedalam-dalamnya*”. Jadi, ternyata kedalaman hasrat, jiwa, filsafat bangsa inilah yang menjadi fondasi Indonesia Merdeka dapat lestari sepanjang masa (Armada Riyanto 2015). Pidato Historis Soekarno menunjukkan bahwa esensi dari kemerdekaan Indonesia tidak hanya terlihat dari hal-hal yang terlihat secara langsung atau permukaan saja. Lebih dari itu, kemerdekaan sejati Indonesia melibatkan aspek yang lebih dalam, seperti hasrat, jiwa, dan filsafat bangsa. Fondasi yang berakar pada kedalaman ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi kemerdekaan Indonesia dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pesan tersebut menyoroti pentingnya memahami dan memelihara nilai-nilai yang mendasari kemerdekaan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan dan relevansinya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Artinya, Pancasila itu memiliki *keluasan* dan *kedalaman* seperti alam pikiran dan jiwa dari berbagai bangsa Indonesia; dan mempunyai *kedalaman* pengertian sedalam jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jika Pancasila memiliki *keluasan* dan *kedalaman* seperti alam pikiran dan jiwa bangsa Indonesia, maka pengandaiannya nilai-nilai Pancasila *pastilah* senantiasa hidup dan dihayati oleh bangsa ini. Nilai-nilai itu memiliki karakter kearifan sekaligus sebagai “tradisi” (warisan luhur) dan nilai *hic et nunc* (di sini saat ini). Kearifan bangsa Indonesia sebagai “tradisi” dan *hic et nunc*, dengan demikian, adalah “roh” dari Pancasila itu sendiri. Atau, Kearifan bangsa inilah fondasi sesungguhnya dari Pancasila (yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia) (Armada Riyanto 2015). Pentingnya Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang mencerminkan keluasan dan kedalaman pemikiran serta jiwa dari berbagai bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila tidak hanya sekedar seperangkat prinsip, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang menyeluruh, yang tercermin dalam pemahaman dan keinginan yang dalam dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jika Pancasila memiliki keluasan dan kedalaman yang sesuai dengan pemikiran dan jiwa bangsa Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila akan selalu hidup dan dihayati oleh bangsa Indonesia.

Pancasila adalah etika bangsa Indonesia dan bobotnya. Pancasila merupakan *cita-cita* bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik karena mengungkapkan *nilai-nilai* yang ingin direalisasikan dalam kehidupan bersama oleh bangsa Indonesia dan karena itu merupakan *keharusan-keharusan* bagi segala kebijakan politik Indonesia *wajib* dalam segala seluk-beluk permasalahannya *mau* mewujudkan Pancasila. Dalam arti ini Pancasila adalah *etika politik* bangsa Indonesia. Etika politik dalam arti *norma-norma* bagi

kebijaksanaan politik Indonesia yang baik dan etis. Dengan lain kata: sebuah kebijaksanaan politik adalah atis sejauh tidak bertentangan dengan, dan sedapat-dapatnya mewujudkan, apa yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang dasar 1945 (Armada Riyanto 2015). Seharusnya nilai-nilai ini yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai demokrasi yang baik dan sesuai dengan nilai Pancasila.

Konsep ideal Pancasila dan realitas politik menggambarkan perbedaan antara cita-cita atau nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan realitas politik yang terjadi dalam praktiknya. Di satu sisi, Pancasila merupakan landasan moral dan filosofis yang mencerminkan keadilan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, realitas politik sering kali jauh dari konsep ideal tersebut. Praktik politik amat mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau individu tertentu, terkadang mengabaikan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, dan demokrasi. Konflik politik, korupsi, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa contoh dari kesenjangan antara konsep ideal Pancasila dan realitas politik yang ada. Meskipun demikian, menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka pemikiran baik itu, pemimpin dan pemangku kepentingan politik diharapkan untuk berkomitmen pada implementasi dan penegakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Idealisme Pancasila dalam Teori dan Praktek

Idealisme Pancasila merujuk pada pemahaman yang mendalam terhadap konsep lima sila sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealisme ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fondasi yang kuat bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia (Thohir et al. 2021). Idealisme Pancasila menjadi fokus penting dalam teori dan praktek politik Indonesia. Nilai-nilai ideal Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, menjadi landasan filosofis bagi pembangunan negara yang adil dan beradab. Analisis mendalam terhadap nilai-nilai ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang esensi Pancasila sebagai panduan moral dalam pembentukan kebijakan dan praktek politik di Indonesia.

Upaya implementasi idealisme Pancasila dalam kebijakan politik sering menjadi tantangan yang kompleks. Meskipun Pancasila diakui secara resmi sebagai dasar negara, mengintegrasikan nilai-nilai idealnya ke dalam kebijakan publik memerlukan komitmen dan kesadaran yang kuat dari para pembuat kebijakan. Selain itu, kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang dinamis juga mempengaruhi sejauh mana nilai-nilai ideal Pancasila dapat diterapkan dalam praktek politik sehari-hari (Wanda, Nurjanah, Dr. Elan, M.Pd, dan Budi Rachman 2022). Analisis mendalam tentang upaya implementasi idealisme Pancasila dalam kebijakan politik mencakup pemahaman terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan visi Pancasila. Faktor-faktor seperti dinamika kekuasaan, pertarungan kepentingan politik, dan tekanan dari berbagai pihak seringkali menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan sosial dan persatuan yang diamanatkan oleh Pancasila.

Meskipun demikian, upaya untuk mengimplementasikan idealisme Pancasila tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia dalam membangun negara yang lebih adil dan beradab. Badan Pembinaan Idealisme Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya adalah menetapkan arah kebijakan dalam pengembangan idealisme Pancasila. Selain itu, BPIP juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, menyelaraskan, dan memajukan upaya pengelolaan pembangunan idealisme Pancasila secara menyeluruh (Anon 2022). Pembangunan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penegakan hukum yang adil, dan promosi toleransi

dan persatuan merupakan beberapa bentuk implementasi dari nilai-nilai ideal Pancasila dalam praktek politik.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang idealisme Pancasila dalam teori dan praktek politik sangat penting dalam membimbing pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan tugas manusia dengan integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Dengan demikian, analisis yang holistik terhadap nilai-nilai ideal Pancasila dan upaya implementasinya dalam kebijakan politik menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan negara Indonesia yang lebih baik. Artinya idealisme Pancasila harus ditegakkan agar nilai hidup manusia dan nilai moral manusia dapat diperjuangkan sesuai dengan sila yang kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Realitas Politik dan Tantangan Implementasi Pancasila

Realitas politik di Indonesia seringkali menimbulkan tantangan yang kompleks dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik (Hamad 2004). Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara cita-cita Pancasila yang mengedepankan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dengan realitas politik yang terkadang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan pertarungan antar kepentingan politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik dan pemangku kepentingan negara. Artinya realitas politik sudah jelas diatur oleh tatanan negara Indonesia dan mempunyai Undang-undang yang jelas, namun Undang-undang itu seringkali menjadi tontonan manusia yang melanggar etika.

Tantangan lain dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik adalah adanya faktor-faktor eksternal dan internal yang menghambat realisasi idealisme Pancasila (Holm 2005). Faktor eksternal seperti tekanan dari pihak asing atau intervensi negara-negara lain dapat mempengaruhi kebijakan politik dan menghambat upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Di sisi lain, faktor internal seperti korupsi, pertarungan kepentingan politik yang beragam, dan kurangnya integritas dalam dunia politik juga dapat menjadi penghalang dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik juga terkadang terhambat oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menangani tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kekerasan politik seringkali mengganggu stabilitas politik dan mempersulit upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam tatanan dunia yang langsung mempengaruhi negara-negara. Dampak perubahan ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia, baik itu dalam bentuk positif maupun negatif. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, karena diperlukan kemampuan untuk menghadapi perubahan tersebut yang akan memengaruhi kehidupan nasional, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Salah satu cara untuk menghadapi tantangan ini adalah melalui pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia akan lebih kuat dalam menjaga moral bangsa dan menjadikannya sebagai pedoman hidup yang utama (Aini Shifana Savitri and Dinie Anggraeni Dewi 2021). Saat ini, banyak generasi muda yang terpengaruh oleh globalisasi sehingga moralitas mereka mudah terpengaruh, terutama oleh pengaruh teknologi yang semakin canggih, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan karena dapat berdampak besar pada kemajuan dan perkembangan generasi bangsa Indonesia.

Tindakan untuk mengatasi tantangan implementasi Pancasila dalam praktek politik, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemimpin politik (Setiawan 2021). Perlunya reformasi politik yang menyeluruh, penguatan lembaga-lembaga negara, penegakan

hukum yang kuat, serta pendidikan politik yang lebih baik menjadi kunci dalam memperbaiki dinamika politik dan mewujudkan visi Pancasila yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan upaya kolaboratif yang koordinatif dan berkesinambungan, harapannya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pemimpin politik memegang peran kunci dalam memperkuat implementasi idealisme Pancasila. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan yang manusia ambil. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila, pemimpin politik dapat membentuk lingkungan politik yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik praktis (Kuntarto 2018). Secara filosofis masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi idealisme Pancasila. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan pengkritik yang konstruktif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui partisipasi aktif dalam proses politik dan advokasi untuk reformasi kebijakan, masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dihormati dan diterapkan dengan baik.

Lembaga-lembaga pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang pemerintah terapkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Tome 2020). Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur sosial, dan kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan keadilan bagi semua warga negara. Secara keseluruhan, strategi untuk meningkatkan implementasi idealisme Pancasila memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemimpin politik, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga pemerintah. Dengan memperkuat pemahaman, komitmen, dan tindakan terkait nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan masyarakat dan lembaga, Indonesia dapat memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang adil, beradab, dan inklusif.

Dinamika Politik Pancasila di Era Kontemporer

Perkembangan zaman modern-milenial maka penting filsafat komunikasi untuk memahami dinamika politik Pancasila di era kontemporer (Mohammad Zamroni 2021). Dinamika politik Pancasila di era kontemporer menghadapi tantangan baru yang tidak terlepas dari perubahan politik global dan perkembangan sosial yang pesat. Tinjauan terhadap perubahan politik Pancasila menunjukkan adanya transformasi dalam paradigma politik, dimana nilai-nilai Pancasila harus diadaptasi dengan dinamika zaman yang terus berubah (Robertus Robet 2021). Hal ini terkait dengan tuntutan masyarakat akan partisipasi politik yang lebih aktif dan adanya perubahan dalam struktur kekuasaan politik yang tradisional.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan sosial turut mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam politik kontemporer. Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik, dengan adanya penetrasi ideologi dan budaya dari luar yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan Pancasila di dalam negeri. Sementara itu, perkembangan sosial seperti teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak besar terhadap partisipasi politik masyarakat serta cara pandang terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi yang mendasari Indonesia, menegaskan peran pentingnya dalam mengatur dan membentuk kehidupan bangsa ini (Karebet et al. 2022). Penting ditekankan bagi manusia untuk mengevaluasi kembali relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks global dan perkembangan sosial yang terus berubah. Perlunya adaptasi dan inovasi dalam implementasi Pancasila untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di era kontemporer. Hal ini melibatkan

pembaharuan dalam tata kelola politik, penguatan partisipasi publik, serta upaya untuk menjaga integritas dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.

Dinamika politik Pancasila di era kontemporer juga menuntut adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan memperkuat dialog antar berbagai pihak dan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan, diharapkan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat lebih efektif dan relevan dengan realitas politik yang ada. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat, karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa (Yanto 2017).

Dapat ditegaskan, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika politik Pancasila di era kontemporer menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Sujito 2022). Perubahan politik global dan perkembangan sosial yang cepat menuntut adaptasi yang cepat dan inovatif dalam implementasi Pancasila, sehingga visi negara yang adil dan beradab dapat terus terwujud di tengah-tengah tantangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi. Maka Pancasila merupakan konsep pemikiran yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai mulia yang telah mendarah daging dalam budaya bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam lima sila Pancasila, yang diharapkan dapat mengikat keberagaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dipandang sebagai himpunan prinsip-prinsip yang abadi, memuat gagasan-gagasan yang layak untuk diperjuangkan.

Peran Pancasila di Negara Indonesia

Pancasila membuktikan dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Pidato Bung Karno “pada peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta”. Bung Karno terharu karena ingat kepada perjuangan dan penderitaan rakyat berpuluh-puluh tahun, yang akhirnya melahirkan Negara Kesatuan Republik berdasarkan Pancasila (Ir. Sukarno 2019). Pancasila memegang peran krusial sebagai benteng negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Pancasila berperan sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan negara yang stabil dan harmonis, menjaga kedaulatan negara serta menyatukan beragam kepentingan dan keberagaman masyarakat Indonesia di bawah satu visi bersama.

Sebagai benteng negara, Pancasila juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi komitmen negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia (Ir. Sukarno 2019). Pancasila memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial, ekonomi dan budaya. Pancasila juga berperan sebagai penangkal korupsi di dalam tubuh negara. Prinsip-prinsip Pancasila, terutama Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut pemerintah dan lembaga negara untuk bertindak secara transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Dengan menegaskan pentingnya keadilan sosial dan integritas dalam pemerintahan, Pancasila memberikan dasar moral yang kuat untuk memerangi korupsi sebagai ancaman serius bagi keadilan dan kemakmuran negara.

Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan politik, hukum, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan (Oktaviana and Dewi 2022). Prinsip-prinsip Pancasila, seperti Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, menegaskan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara serta pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan berdasarkan musyawarah. Pancasila menciptakan landasan yang kuat untuk sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif, di mana kepentingan seluruh rakyat Indonesia diakomodasi dan diwakili dengan adil dan proporsional. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki status sebagai fondasi negara dan memiliki dimensi filosofi politik. Hal ini karena para pendiri bangsa pada waktu itu menempatkan Pancasila dalam konteks kehidupan bernegara secara khusus. Selain itu, Pancasila juga dipandang sebagai landasan hukum yang meliputi berbagai aspek, baik yang tertulis dalam teks UUD 1945 maupun yang tidak tertulis di dalamnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi panduan bagi ideologi negara, tetapi juga mempengaruhi segala aspek kehidupan hukum, baik yang terwujud dalam teks Undang-undang maupun yang bersifat tidak resmi (Suaila and Krisnan 2019).

Secara keseluruhan, peran Pancasila di negara Indonesia tak terbantahkan. Sebagai benteng negara, Pancasila menjamin kedaulatan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber keadilan, moralitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan memelihara prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia dapat membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Peran Pancasila dapat dianggap sebagai pandangan nasional yang sangat penting untuk membimbing generasi muda Indonesia. Pandangan nasional ini dianggap sebagai semangat kesatuan bangsa karena mencerminkan dinamika dalam proses pembentukan dan pemeliharaan bangsa dan negara, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan dan perjuangan untuk mempertahankannya. Melihat keberagaman masyarakat di Indonesia, seperti dalam agama, suku, ras, warna kulit, dan jenis kelamin, menjadi faktor yang signifikan (Wijayanti et al. 2022).

Kesimpulan

Kontras antara visi ideal Pancasila yang mengutamakan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dengan realitas politik di Indonesia yang seringkali terpengaruh oleh dinamika kekuasaan, korupsi, dan pertarungan antar kepentingan politik sangat jelas terlihat dalam praktik politik sehari-hari. Meskipun Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur tersebut, namun implementasinya seringkali terdistorsi oleh praktek politik yang korup, dimana kepentingan pribadi dan kelompok seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dinamika politik yang terus berubah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik politik sehari-hari. Perubahan tersebut mencakup perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, serta beragamnya kepentingan politik yang harus diakomodasi oleh pemerintah. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak juga turut mempersulit menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap keputusan politik yang diambil. Perubahan sosial dan beragamnya kepentingan politik, di samping tekanan eksternal, menjadi faktor utama yang menghalangi konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Meskipun prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar negara, tantangan-tantangan dalam politik sehari-hari sering kali memaksa pemerintah untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah, sehingga tidak selalu memungkinkan untuk mempertahankan kesinambungan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kurangnya komitmen pemimpin negara untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten menyebabkan ketidakstabilan politik dan keraguan dalam masyarakat terhadap efektivitas Pancasila sebagai landasan negara. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemimpin politik. Perlunya reformasi politik, penguatan

lembaga-lembaga negara, penegakan hukum yang kuat, serta pendidikan politik yang lebih baik menjadi kunci dalam memperbaiki dinamika politik dan mewujudkan visi Pancasila yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Abidin, Nur Fatah. 2020. "Pancasila Sebagai the Living Values Dalam Pengalaman Sejarah Kebangsaan Indonesia." *Journal Candi* 20(1):98–110.

Aini Shifana Savitri, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi." *Inventa* 5(2):165–76. doi: 10.36456/inventa.5.2.a3549.

Anon. 2022. "Pembangunan Aplikasi Mobile Kontributor Untuk Pengisian Informasi Publikasi Dengan Model Agile." *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer* 8(1):144–60. doi: 10.37012/jtik.v8i1.794.

Armada Riyanto, dkk. 2015. *KEARIFAN LOKAL PANCASILA; Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Aulia, Lulu Rahma, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. 2021. "Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3):8549–57.

Eko Armada Riyanto. 2014. *BERFILSAFAT POLITIK*. Yogyakarta: Kanisius.

Hamad, Ibnu. 2004. "Makara Human Behavior Studies in Asia Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999) (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999)." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 8(1):21–32.

Holm, Kyrre. 2005. "Constitutional Question [5]." *Economist* 377(8450):20.

Ir. Sukarno. 2019. *FILSAFAT PANCASILA Menurut BUNG KARNO*. Yogyakarta: MEDIA PRESSINDO.

Karebet, A., F. A. Ardiyanti, M. A. Hendico, and ... 2022. "Urgensi Memahami Pancasila Di Era Kontemporer." ... *Ekonomi, Sosial & ...* 4(4):88–91.

Kuntarto, Eko. 2018. "BAHASA DAN KEKUASAAN POLITIK OPOSAN DI INDONESIA: ANALISIS Wacana KRITIS." *Jurnal Kiprah* 6(2):37–47. doi: 10.31629/kiprah.v6i2.860.

Lubis, Elvi Zahara. 2018. "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 7(2):107. doi: 10.31289/jap.v7i2.1332.

Mohammand Zamroni. 2021. *FILSAFAT KOMUNIKASI; Pengantar Ontologis, Epistemologi, Dan Aksiologis*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Oktaviana, Dinda, and Dinie Anggraeni Dewi. 2022. "Peran Pancasila Dalam Menangani Krisis Moralitas Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(1):1599–1600.

Robertus Robet. 2021. *REPUBLIKANISME Filsafat Politik Untuk Indonesia*. Jakarta: CV Marjin Kiri.

Setiawan, M. Nanda. 2021. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2(1):1–21.

Suaila, Agna, and Johny Krisnan. 2019. "Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Global." *Law and Justice* 4(1):46–55. doi: 10.23917/laj.v4i1.8066.

Sujito, Arie. 2022. "Pancasila Dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024." *Jurnal Pancasila* 3(2):13–32.

Thohir, Muhammad, Muhammad Hamdan Za'imuddin, Izza Nur Fuadina, and Ayu Laila Fitri. 2021. "Relevansi Sikap Profetik Dengan Dimensi Idealisme Pancasila: Sistem Nilai Dalam Menghadapi Tekanan Ekonomi Dan Mental Selama Pandemi Covid-19." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9(1):111. doi: 10.31764/civicus.v9i1.3807.

Tome, Abdul Hamid. 2020. "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa." *Al- 'Adl* 13(1):118. doi: 10.31332/aladl.v13i1.1717.

Wanda , Nurjanah, Dr. Elan, M.Pd , dan Budi Rachman, S. P. 2022. "Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Abstrak." *JMECE: Journal of Modern Early Childhood Education* 02(1):pp.15-19.

Wijayanti, Anggi Ayu, Nadine Syandhana, Sovira Hikari, Luna Shinkoo, and Riska Andi Fitriono. 2022. "Peran Pancasila Di Era Globalisasi Pada Generasi Z." *Jurnal INTELEKTIVA* 4(1):29–35.

Yani, Ahmad. 2018. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(2):119. doi: 10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135.

Yanto, Dwi. 2017. "Etika Politik Pancasila." *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah Kalimantan* 15(27):23–28.